



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH - 10.AH.11.01 TAHUN 2017  
TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN  
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG  
PERIODE 2015-2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerima Surat Permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor: B-284/DPP-Sek/06/1438 H, tanggal 29 Maret 2017, hal Permohonan Pengesahan Perubahan Kepengurusan Partai Bulan Bintang;
- b. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap berkas permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a, telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 12 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu dibuat Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2015-2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1642);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473).

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG PERIODE 2015-2020.**
- PERTAMA :** Mengesahkan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB), dengan kedudukan kantor tetap di Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18, No. 1B, Jakarta Selatan, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor: 46, tanggal 24 Maret 2017 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 1436-1441H/2015-2020M, yang dibuat dihadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan.
- KEDUA :** Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2015-2020, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA :** Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-14.AH.11.01 TAHUN 2015, tanggal 07 Juli 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA :** Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA



YASSONNA H. LAOLY



## **PIMPINAN PUSAT**

<b>Ketua Umum</b>	<b>: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH</b>
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi	: H. Jamaluddin Karim, SH., MH
Wakil Ketua Umum Bidang Penanganan Pemilu	: Dr. Muhanto AQ, MM
Wakil Ketua Umum Bidang Dakwah dan Pengembangan Jaringan Umat	: H.M. Syarifien Maloko,SH.,M.Si., MM
Wakil Ketua Umum Bidang Pengaderan, Pemberdayaan Pejabat Publik dan Badan-Badan Otonom	: Ir. H. Eddy Wahyudin, MBA
Wakil Ketua Umum Bidang Polhukam	: Jurhumm Lantong
Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan Kesra	: Prof. Dr. Masyhudulhaq
Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Partai	: Drs. Dwianto Ananias
Ketua Bidang Verifikasi dan Keanggotaan	: Zulkifli, S.SI., M.Si
Ketua Bidang Sistem Informasi	: Harjono Padmono Putro,ST.,M.Kom.
Ketua Bidang Penanganan Legislatif dan DPD	: Hilman Indra, SE
Ketua Bidang Penanganan Presiden	: Sukno Harsono, SE
Ketua Bidang Penanganan Pilkada	: Drs. Yusuf Hasani, M.Si
Ketua Bidang Dakwah dan Pengembangan Jaringan Ummat	: Drs. M. Taufik Rahman, MM.
Ketua Bidang Komunikasi dan Opini Publik	: Ir. Alexander David Pranata Boer
Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Aksi Sosial Kemasyarakatan	: Hj. Ramdhiana Nuzul Qadrina, SH
Ketua Bidang Pengaderan	: H. Mawardi Abdullah, SE, MM.
Ketua Bidang Pembinaan Anggota Legislatif dan Pejabat Publik	: Ahmad Rusdi, SE.
Ketua Bidang Pembinaan Badan-Badan Otonom	: Husni Jumat,S.Sos,I
Ketua Bidang Politik, Hankam dan Luar Negeri	: Dr.C Yurisman Star, SE., M,Si
Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	: Dr. Youngky Fernando, SH, MH
Ketua Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Agraria	: Amrullah Andi Hamid, SE
Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah	: Dr. Hendri Tanjung
Ketua Bidang Pembangunan Nasional, Wilayah dan Pedesaan	: Dr. Ir. Ahmad Bachtiar Amin, M.Sc.
Ketua Bidang Bisnis dan Koperasi	: H. Andi Darwis, SE
<b>Sekretaris Jenderal</b>	<b>: Ir. Afransyah Noor, M.Si</b>
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Partai	: Ir. Abdul Kadir. Assegaf

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Verifikasi dan Keanggotaan	: Drs. Yunasdi
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Sistem Informasi	: Hadi Priyono
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemenangan Legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah	: Mulyadi, ST
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemenangan Presiden	: Rona Lubis, SE
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemenangan Pilkada	: NS. Aji Martono, SHI, CSA
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Dakwah dan Pengembangan Jaringan Ummat	: Syarifah Lulu Asegaf
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi dan Opini Publik	: Solihin Pure, SP
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Aksi Sosial Kemasyarakatan	: Swary Utami Dewi, MA.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pengaderan	: Ratna Juita Jakoeb, S.Ag.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pembinaan Anggota Legislatif dan Pejabat Publik	: Hasfil Nazir, SE.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pembinaan Badan-Badan Otonom	: Ir. Doriangat Pakpahan
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Politik, Hankam dan Luar Negeri	: Gusti M.Faisal
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	: H. Ismar Syafruddin, SH., MA
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Agraria	: Ir. Dt. Ajuansyah Putra Surbakti
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah	: Muh Ludfi Adi Susilo
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pembangunan Nasional, Wilayah dan Pedesaan	: Nia Kurniasari, ST, MT
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Bismis dan Koperasi	: Edi Fakhri, S.Sos., M. Sos., MS
<b>Bendahara Umum</b>	: <b>Aris Muhammad, SH</b>
Bendahara	: Leo Fernando, SE., Akt.
Bendahara	: Abdul Kadir Lamanelle
Bendahara	: Yayan Yanuari, SE., MM
Bendahara	: Mariana, SE., MM
Bendahara	: Mahadir Basti, SH
Bendahara	: Drs, Syahrudin, MM
Bendahara	: Rina Damayanti
Bendahara	: Ir. Silvia Rahmi

## **DEPARTEMEN-DEPARTEMEN**

### **Departemen Penguatan dan Pembinaan Infrastruktur**

- Ketua : Ir. Alfian Zulham Siregar
- Anggota : Nurul Fauziah Azizah, SE
- Anggota : Rizky Permatasari, S.Kom
- Anggota : Riswanto Paputungan

### **Departemen Pembinaan Pengembangan Aparat**

- Ketua : Rina Ratlina. S. Sos., M. Ikom
- Anggota : Linda Meri, SH
- Anggota : Putri Ariska Anggraeni Noor, S.Psi

### **Departemen Pemantapan Verifikasi**

- Ketua : Dewi Sartika Sari
- Anggota : Triana Widya Wijayanti, S.Sos.
- Anggota : Daliy Darsi Sulastri
- Anggota : Aida Royani

### **Departemen Rekrutmen Anggota**

- Ketua : Affan Madjrie
- Anggota : Sri Wahyuni
- Anggota : Khairani, Amd

### **Departemen Pembangunan dan Pengembangan Sistem IT**

- Ketua : Tauflikurrahman, S.Sos,MM
- Anggota : Henry Nizmul Fallah
- Anggota : Fitriyana Ikhsan Syahrul

### **Departemen Kearsipan dan Database**

- Ketua : Nurdiana, S.Sos, M.Hum.
- Anggota : Arini Syarafina, Lc
- Anggota : Arnold H. Abdi

### **Departemen Dakwah**

- Ketua : Zulkifli Nadjamuddin
- Anggota : Eti Yuliati, S.Pd.I
- Anggota : Emil Salim, S.Pd.I

### **Departemen Pengembangan Jaringan Ummat**

- Ketua : Ir. H. M. Umar Fatah
- Anggota : Fajar
- Anggota : Dra. Hj. Rosnoni
- Anggota : Hiroshi Imeda

### **Departemen Komunikasi**

- Ketua : Zulfickar, S.Kom.
- Anggota : Shinta Wulan
- Anggota : Sri Mulyana

### **Departemen Pengelolaan dan Pengembangan Opini Publik**

- Ketua : M. Azrul Saleh Rumata
- Anggota : Siti Rohana
- Anggota : Puji Astuti
- Anggota : Novel Damopoli

### **Departemen Pemberdayaan Perempuan**

- Ketua : Dra. Hj. Elmayetty, MZ.
- Anggota : Yuli Astuti
- Anggota : Syifa Aulia
- Anggota : Wiwi Dewi Maria, Amd

**Departemen Aksi Sosial Kemasyarakatan**

- Ketua : Dr. Askin Asyik
- Anggota : Noor Fikri Harakan
- Anggota : Dr. Betty Sulistyaningasih
- Anggota : Kartika

**Departemen Pembinaan dan Pengembangan Pejabat Publik**

- Ketua : Nashruddin Muharrar.
- Anggota : Raudatul Firdah, S.Sos
- Anggota : Rita Sahagia, SE
- Anggota : Riza Haryo Mahendra Putra

**Departemen Pembinaan dan Pengembangan Anggota Legislatif**

- Ketua : Dra. Iis Yeni Suryani
- Anggota : Arni Dasrianti, Amd.
- Anggota : Mardiah Soleiman
- Anggota : Arif Mulyadi

**Departemen Politik, Pertahanan dan Keamanan**

- Ketua : Firmansyah, SH
- Anggota : Bebeng Riyanto
- Anggota : Lis Purwanti, S.Sos
- Anggota : Siti Dara Rahman, SH

**Departemen Hubungan Luar Negeri**

- Ketua : Yanti Amelia
- Anggota : Utin Nadlia Sofia
- Anggota : Sabrina Farahiyah
- Anggota : Ikrok, SE, SH

**Departemen Hukum dan Perundang-undangan**

- Ketua : Edi Wirahadi, SH
- Anggota : Azminal Noor, SH
- Anggota : Riyanti, SH.
- Anggota : Nur Syamsiati Duha, SH., MH.
- Anggota : Mahtudin, SH

**Departemen Hak Asasi Manusia**

- Ketua : Sutan Syafardi Piliang, SH, MH
- Anggota : Merry Aprianti, SH., MH
- Anggota : Mulyasari, SH., MH.
- Anggota : Vega Liattan, SE., SH., MH

**Departemen Pemerintahan Dalam Negeri**

- Ketua : Syaiful Alam
- Anggota : Dian Tri Andini
- Anggota : Titin Solponiatin
- Anggota : Nandang Rahmat Mulya

**Departemen Agraria**

- Ketua : Yun Ermento, SH., MH.
- Anggota : Eri Edhi Satrio, SH
- Anggota : Dra. Sri Suleha

**Departemen Ekonomi dan Keuangan**

- Ketua : Farlaini Barmawi, BSC
- Anggota : Ida Yani Nasroen
- Anggota : Mualimin, S, Pd.I
- Anggota : Eka Widiyati
- Anggota : Tina Melinda

**Departemen Perbankan Syariah**

Ketua  
Anggota  
Anggota  
Anggota

: Hendra Kusuma, S. Pdi.  
: Yosy  
: Andriani  
: Indah Destiyanti, SE

**Departemen Pembangunan Nasional**

Ketua  
Anggota  
Anggota

: Athori Lubis, ST.  
: Anton Pranowo Mediono  
: Sofyan

**Departemen Pembangunan Wilayah dan Pedesaan**

Ketua  
Anggota  
Anggota

: Sulaiman Pete, SE  
: Aries Maryani  
: Jauhari Mokodompit

**Departemen Pengembangan Bisnis**

Ketua  
Anggota  
Anggota  
Anggota

: Muhammad Nasihin  
: Diah Yudiastuti  
: Rahmawati  
: Rizal Tambunan

**Departemen Koperasi**

Ketua  
Anggota  
Anggota  
Anggota

: H. Sunding  
: Nurlaela  
: Choiri Inayah  
: Dra. Yusidawati



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASSONNA H. LAOLY